

Efektivitas Otoritas Veteriner dalam Kebijakan Penanganan Kasus Penyakit Mulut dan Kuku di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat

*((EFFECTIVENESS OF VETERINARY AUTHORITIES
IN THE POLICY OF HANDLING FOOT AND MOUTH DISEASE
CASES IN PANGALENGAN, BANDUNG, WEST JAVA))*

**Marisya Salsabila Maharani Putri¹,
Dwi Cipto Budinuryanto², Rini Widyastuti^{2,3}**

Program Sarjana Kedokteran Hewan¹
Departemen Produksi Ternak Fakultas Peternakan²
Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran³
Universitas Padjadjaran,
Jl. Ir. Soekarno km.21, Hegar Manah, Jatinangor
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia 45360
email: marisyaslsbl@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the quality of Veterinary Authority service in handling livestock farmers affected by Foot and Mouth Disease (FMD) in Pangalengan District, West Java Province. The method used is a survey with a questionnaire instrument distributed to livestock farmers affected by FMD and in-depth interviews. This study used nine respondents who have a close relationship with the realization of policies in field conditions. The analysis was carried out using the Gap Analysis and Importance Performance Analysis (IPA) approaches that focus on the comparison between the level of importance and performance of services provided by the Veterinary Authority. The results of the equation are explained and mapped into four quadrants on a Cartesian diagram. Analysis of the level of satisfaction of Veterinary Authority services in Pangalengan Regency, West Java Province, shows that livestock farmers are generally satisfied with the services provided with a satisfaction percentage reaching 64.75%. Most of the major services have met their expectations, reflecting the effectiveness of the Veterinary Authority in handling the needs of those affected by FMD. There is still room for further quality development in several attributes to improve overall service quality.

Keywords: Foot and Mouth Disease; Veterinary Authority, policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan jasa Otoritas Veteriner dalam penanganan peternak terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kecamatan Pangalengan, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah survei dengan instrumen kuesioner yang didistribusikan kepada peternak terdampak PMK dan

wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan sembilan responden yang memiliki hubungan erat dengan realisasi kebijakan pada kondisi lapangan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan *Gap Analysis* dan *Importance Performance Analysis* (IPA) yang berfokus kepada perbandingan antara tingkat kepentingan dan kinerja layanan yang diberikan oleh Otoritas Veteriner. Hasil kesenjangan dianalisis dan dipetakan ke dalam empat kuadran pada diagram kartesius. Analisis tingkat kepuasan pelayanan Otoritas Veteriner di Kabupaten Pangalengan, Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa peternak secara umum merasa puas dengan layanan yang diberikan dengan presentase kepuasan mencapai 64,75%. Sebagian besar layanan telah memenuhi harapan mereka yang mencerminkan efektivitas Otoritas Veteriner dalam menangani kebutuhan mereka yang terdampak LSD. Ruang pengembangan kualitas lebih lanjut masih terdapat pada beberapa atribut untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

Kata kunci: otoritas veteriner, penyakit mulut dan kuku, kebijakan

PENDAHULUAN

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit menular dan akut yang menyerang hewan ternak berkuku genap atau berkuku belah seperti sapi, kambing, domba, kerbau dan babi. Selain hewan tersebut, PMK juga dapat menyerang hewan liar berkuku genap atau berkuku belah, seperti gajah, rusa, unta, kerbau afrika dan lain-lain (Rohma *et al.*, 2022). Penyakit PMK tersebut dapat digolongkan sebagai *air borne disease* karena *strain* virus penyakit tersebut dapat menyebar cepat dengan bantuan angin hingga sejauh seratus kilometer dari lokasi kejadian. Penyakit Mulut dan Kuku bukan merupakan penyakit zoonosis, namun demikian penyakit ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar (Budiono *et al.*, 2023; Awel *et al.*, 2021). Kerugian finansial yang ditimbulkan oleh PMK adalah penurunan produksi susu hingga 25% per tahun, penurunan fertilitas, penurunan laju pertumbuhan pada sapi potong, pemusnahan ternak yang terinfeksi kronis, hilangnya tenaga kerja, terganggunya perdagangan dalam negeri, hilangnya peluang ekspor ternak, biaya pemberantasan dan kematian (Firman *et al.*, 2022).

Virus yang menyebabkan PMK termasuk ke dalam famili Picornaviridae dengan genus Aphthovirus (MacLachlan dan Duvovi, 2017). Picornavirus termasuk sebagai golongan virus dengan kelas IV yang memiliki

genom *plus-strand-RNA* sebagai fungsi menjadi mRNA. Sel yang diinfeksi oleh virus picornaviridae nantinya akan membentuk protein serta akan terlihat adanya perbanyakan virus melalui RNA. Jika jumlah RNA pada tubuh dirasa sudah mencapai batas minimal maka fungsi dari RNA akan berubah menjadi mRNA yang berfungsi menjadi pola untuk memperbanyak virus RNA. Variasi genetik pada virus dapat terjadi melalui mutasi atau rekombinasi homolog antara dua galur virus PMK yang berbeda sehingga menghasilkan varian virus PMK baru yang secara signifikan memengaruhi pemilihan galur vaksin (Al-Salihi, 2019).

Virus PMK mempunyai tujuh serotipe, antara lain serotipe A, O, C, Asia 1, *Southern African Territories* (SAT) 1, SAT 2 dan SAT3 (Azeem *et al.*, 2020). Secara gambaran mikroskop virus PMK memiliki bentuk ikosahedral simetri dengan ukuran kapsid antara 25-30 nm. Kapsid virus Picorna tersusun oleh 60 sub-unit protein yang identik. Masing-masing unit mengandung empat viral protein. Setiap viral protein mengandung *8-stranded β -barrel* sama dengan halnya yang dimiliki oleh *capsid* virus lainnya. Semua serotipe virus PMK menyebabkan gejala klinis yang serupa 2-14 hari pascainfeksi (Onodera *et al.*, 2023)

Pada skala dunia PMK menyebar hingga 77% populasi ternak global yang

berada di Afrika, Timur Tengah, Asia dan beberapa wilayah yang berada di Amerika Selatan. Di Indonesia, penyakit PMK ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1987 di Malang, Jawa Timur, akibat ikutan mengimpor sapi perah dari Belanda. Pada tahun 1983, penyakit PMK ini terakhir kali ditemukan di Jawa dan berhasil diberantas melalui program vaksinasi massal, sehingga pada tahun 1986, Indonesia dinyatakan bebas dari PMK dan menjadi negeri bebas PMK selama 36 tahun (Budiono *et al.*, 2023). Indonesia secara resmi telah dinyatakan bebas PMK oleh

Office International des Epizooties (OIE) pada tahun 1990 dan wajib mempertahankan status bebas PMK tersebut tanpa vaksinasi (Dharmawibawa *et al.*, 2022). Setelah 36 tahun bebas PMK, penyakit tersebut kembali masuk pada tanggal 5 Mei 2022 di Jawa Timur dan menyebar ke beberapa daerah di Indonesia.

Sejak tahun 2013 Pemerintah Indonesia menetapkan PMK masuk menjadi salah satu Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tertulis di Pasal 1 Ayat 36 tentang penyakit hewan menular strategis merupakan penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian ternak berkuku belah yang tinggi.

Penyebaran masif wabah PMK tercatat mulai awal April 2022 sampai akhir bulan September 2022. Angka persebarannya telah merebak menuju 24 provinsi dari total 34 provinsi Indonesia. Total kasus PMK di Jawa Barat mencapai angka kasus 13.493 ekor dengan total angka kesembuhan 2.311 kasus. Kasus tertinggi sebanyak 1.596 kasus dilaporkan terdapat pada Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan sedangkan kasus terendah yang mana hanya terdapat satu kasus dilaporkan terjadi di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Serang Baru.

Pada bulan Agustus 2022 kasus PMK di Jawa Barat mencapai 48.907 kasus. Selang dua bulan kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Oktober tahun 2022 telah mencatat 1.932 ternak di

Provinsi Jawa Barat dinyatakan masih positif PMK. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat menyatakan bahwa pada bulan yang sama tingkat kasus kesembuhan PMK di Jawa Barat sudah mencapai 80% akan tetapi angka tersebut masih tinggi. Jumlah kasus PMK di Kabupaten Bandung terutama kasus pada sapi perah mendominasi angka kasus PMK di wilayah tersebut

Melihat tingginya kasus PMK, Kementerian Pertanian meningkatkan fungsi Otoritas Veteriner seperti membatasi lalu lintas hewan yang dapat membawa virus PMK hingga kemudian adanya pemotongan bersyarat bagi ternak yang terkena PMK. Kemudian fungsi dari Otoritas Veteriner dimaksimalkan dalam kebijakan penanganan PMK yang dimulai dari skala nasional hingga daerah guna menekan angka persebaran PMK.

Berdasarkan Surat Edaran Satuan Petugas Pertanian No 3 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK dibuat untuk melengkapi surat edaran sebelumnya, yaitu Surat Edaran Satuan Petugas Pertanian No 2 Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, Pasal. 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah yang memiliki fungsi sebagai kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Berdasarkan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah sebagai langkah positif penanggulangan wabah PMK, penulis melakukan kajian dengan tujuan untuk mengetahui kepuasan peternak terdampak terhadap layanan jasa Otoritas Veteriner dalam penanganan kasus PMK di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hasil pengolahan data terkait pelayanan Otoritas Veteriner diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi dalam meng-optimalisasi kinerja untuk masa mendatang dalam menekan penyebaran

penyakit hewan ternak.

METODE PENELITIAN

Sumber sampel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1) sembilan responden merupakan pejabat Otoritas Veteriner, terhadap mereka dilakukan wawancara mendalam dan 2) 35 responden merupakan peternak di lapangan untuk kuantifikasi *Importance-Performance Analysis* (IPA). Sembilan responden untuk wawancara mendalam yang diambil merupakan responden yang dapat mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang kebijakan PMK di Kecamatan Pangalengan. Adapun ketentuan sampel di antaranya adalah Dokter Hewan Berwenang, peternak, Dokter Hewan yang berada di lapangan, dan pejabat Otoritas Veteriner yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah tentang PMK. Kuantifikasi IPA dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisi 19 variabel, data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.0 for windows, untuk kemudian divisualisasikan menjadi empat kuadran, yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara harapan dan keadaan aktual di lapangan.

Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan metode *non-probability sample* yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan ketentuan ditetapkan oleh peneliti secara subjektif (Petrie dan Watson, 2013). Lokasi pengumpulan data mencakup Dinas Peternakan Kabupaten Bandung, Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Tempat Pengkoleksian Susu Cipanas, Los Cimaung, Citere, Babakan Kiara dan Warnasari.

Sebelum kuesioner disebarakan kepada Para Peternak, Dokter Hewan Berwenang, dan Otovet dilakukan pengujian terhadap masing-masing atribut dengan menggunakan uji validitas dan realibilitas. Uji validitas bertujuan mengukur suatu ukuran guna melihat variabel yang diukur tepat menjadi variabel yang hendak diteliti oleh peneliti, sedangkan uji realibilitas merupakan uji yang dilakukan untuk

melihat sejauh apa hasil pengukuran dengan objek yang sama menghasilkan *output* hasil yang sesuai (Taber, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

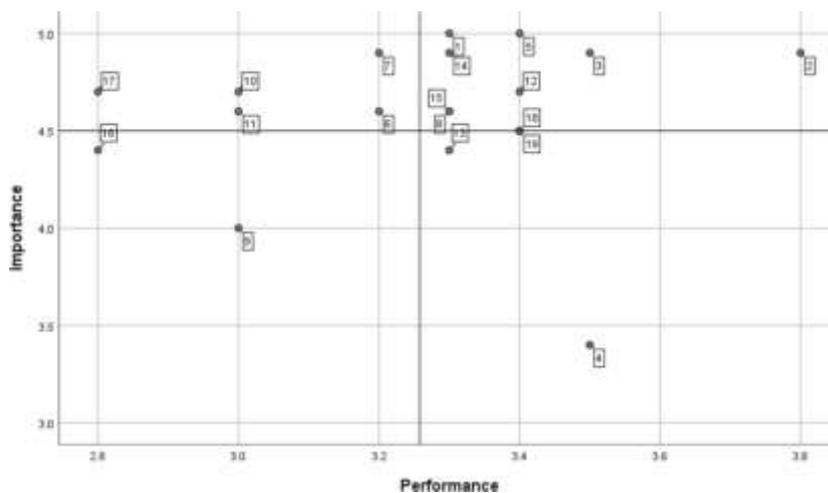
Kuesioner dikatakan valid apabila hasil r-hitung (*corrected item-total correlation*) lebih besar dari r-tabel. Pengujian validitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 35 responden yaitu Dokter Hewan yang bekerja di Dinas Peternakan di Indonesia yang dapat menilai langsung apakah kinerja otovet pada wilayah mereka sudah sesuai dengan harapan mereka atau belum. Hasil dari uji validitas diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26.0 for windows dari tiap dimensi (*tangibles, realibility, assurance, responsives, empathy*) menunjukkan bahwa nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, dengan r-tabel sebesar 0,334. Sementara itu hasil dari uji realibitas menggunakan metode Alpha Cronbach menggunakan aplikasi SPSS versi 26.0 for windows. Jika hasil uji realibitas lebih besar dari 0.600, maka atribut dari kuesioner dapat digunakan untuk penelitian. Berdasarkan hasil dari uji realibitas lima dimensi (Bukti Fisik, Keandalan, Jaminan, Daya Tanggap, Empati) menunjukkan nilai r-alpha lebih besar dari r-kritis (Alpha Cronbach)

Hasil penelitian (Tabel 1) yang didapatkan bahwa dari sembilan responden, menunjukkan Gap analysis sebesar -25,4. Hasil Gap negatif didapat apabila hasil skor *importance* lebih besar dari skor *performance*. Apabila hasil total Gap negatif maka mengindikasikan bahwa peternak dan dokter hewan belum puas terhadap layanan yang diberikan oleh otovet. Perusahaan dengan tingkat pelayanan yang baik selalu mempunyai nilai Gap yang kecil (Kim dan Ji, 2018).

Menurut Beck dan Steer (1993) agar mengetahui tingkat persentase rata-rata maka dapat dicari dengan melakukan pembagian jumlah skor total dari responden dengan jumlah responden kemudian

Tabel 1. Nilai kesenjangan kinerja dan kepentingan pelayanan Otoritas Veteriner dalam penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Pangalengan, Bandung

No	Dimensi	Kinerja (<i>Performance</i>)	(Kepentingan) <i>Importance</i>	Kesenjangan (<i>Gap</i>)
1	<i>Tangibles</i> (Bukti Fisik)	14,1	18,2	-4,1
2	<i>Realibity</i> (Kehandalan)	16,1	23,1	-7
3	<i>Responsives</i> (Daya Tanggap)	9,4	14	-4,6
4	<i>Assurance</i> (Jaminan)	12,7	18,3	-5,6
5	<i>Emphaty</i> (Empati)	9,6	13,7	-4,1
6	Jumlah	61,9	87,3	-25,4

Gambar 1. Hasil Persebaran Kuadran *Importance-Performance Analysis*

mengklasifikasi tingkat persentase kepuasan dengan kriteria: rendah (20-40%), sedang (41-79% dan tinggi (80-100%)

Hasil yang telah didapat kemudian dibagi dengan cara, jumlah keseluruhan skor dibagi dengan jumlah responden, maka didapatkan persentase kepuasan dengan skor sebesar 65,47%. Hal tersebut menun-

jukkan bahwa tingkat kepuasan berada di tingkat sedang.

Importance Performance Analysis merupakan sebuah metode yang bertujuan mengukur hubungan antara prioritas untuk meningkatkan kualitas suatu produk atau jasa dan sering kali disebut dengan *quadrant analysis* (Hua dan Chen, 2019).

Tabel 2. Tingkat kesesuaian responden kuesioner pelayanan Otoritas Veteriner dalam penanggulangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku di Pangalengan, Bandung

No	Variabel	Atribut	Xi	Yi	Tki %
1	<i>Tangibles</i>	Sarana prasarana penunjang dalam penanganan PMK	29	45	64%
2		Ketersediaan alat disinfeksi	34	44	77,3%
3		Tersedia informasi terbaru pada website crisis center	31	44	70,5%
4		Penampilan pejabat otovet yang rapi dan menarik	32	30	1,07%
5	<i>Realibity</i>	Apakah otovet memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti	30	45	66,7%
6		Apakah pelayanan dari otovet sudah sesuai dengan yang diharapkan	28	41	68,3%
7		Apakah otovet melakukan pendataan secara tepat	28	44	63,6%
8		Apakah otovet menyediakan layanan sesuai yang dijanjikan	29	41	70,8%
9	<i>Responsives</i>	Apakah otovet memiliki alur komando yang mudah dipahami?	27	36	75%
10		Apakah otovet cepat dalam menyelesaikan masalah PMK?	27	42	64,3%
11		Apakah otovet tanggap dalam menerima masalah	27	41	65,9%
12		Apakah otovet menyampaikan informasi dengan jelas dalam kebijakan PMK?	30	42	71,4%
13	<i>Assurance</i>	Apakah jaminan keamanan dari otovet sesuai harapan? (keamanan dalam kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan yang diharapkan serta keamanan jawaban yang diberikan tidak menyebarluas kepada pihak yang tidak bersangkutan)	29	39	74,4%
14		Apakah penanganan keluhan direspon dengan baik oleh otovet?	29	44	66%
15		Apakah otovet bertanggung jawab atas hal yang dia lakukan?	29	41	71%
16	<i>Emphaty</i>	Bagaimana otovet pusat dapat memastikan kebijakan baru yang dibuat dapat di implementasi oleh otovet daerah?	25	39	64,1%
17		Apakah otovet mengerti kebutuhan peternak?	25	42	59,5%

Lanjutan Tabel 2. Tingkat kesesuaian responden kuesioner pelayanan Otoritas Veteriner dalam penanggulangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku di Pangalengan, Bandung

Variabel	Atribut	Xi	Yi	Tki %
	Apakah pelayanan dari otovet diberikan dengan penuh perhatian?	30	40	75%
	Apakah otovet memberikan rasa amandan nyaman dalam menerima aduan?	30	40	75%

Importance Performance Analysis digunakan untuk mengukur dan menganalisis tingkat *importance* (kepentingan) dan *performance* (tingkat kinerja) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana atribut pada penerapan kebijakan publik yang telah dibuat oleh otovet pada Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung yang perlu diperbaiki maupun yang perlu dipertahankan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam kebijakan publik yang dirancang.

Masing-masing kuadran memiliki kepentingan dan kebutuhannya sendiri sebagaimana kuadran A adalah kuadran yang mana tingkat kepuasannya masih rendah sehingga menjadi urgensi utama yang kinerjanya harus diperbaiki, kuadran B kuadran yang memiliki harapan dari para peternak dan masyarakat yang mana atribut pada kuadran ini sudah dinilai baik, kuadran C kuadran yang memiliki prioritas rendah namun apabila ditingkatkan dapat menjadi variabel yang berada di kuadran A dan kuadran D adalah kuadran yang memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah tetapi realisasi dalam kinerjanya lebih tinggi. Apabila kuadran D ditingkatkan kinerjanya maka variabel yang berada di kuadran D dapat berpindah kuadran. Berdasarkan hasil gambar persebaran kuadran terdapat lima atribut pertanyaan di kuadran A, 10 atribut pertanyaan di kuadran B, dua atribut pertanyaan di kuadran C, serta satu atribut berada di kuadran D. Maka dari itu yang akan menjadi urgensi utama kinerja diperbaiki adalah variabel yang berada di kuadran A, karena kuadran A dianggap sangat penting, akan tetapi realisasi di lapangan dianggap kurang memuaskan,

adapun kuadran B perlu diperhatikan juga karena apabila kinerjanya menurun dan menjadi tidak sesuai, terdapat kemungkinan variabel di kuadran B dapat berpindah menjadi variabel yang berada di kuadran D. Keempat kuadran hasil pengolahan data menggunakan SPSS *for windows* 26.0 untuk pengujian *Importance Performance Analysis* dengan skor rata-rata yang membatasi sebesar 3,25 pada sumbu-x dan hasil sebesar 4,5 pada sumbu-y. Garis yang menjadi perbatasan antar sumbu-x dan sumbu-y didapatkan dengan menggunakan rumus nilai kesesuaian antar tingkat kepentingan dengan tingkat kinerja (Supranto, 2016) yaitu: $TKi = [Xi \times (Yi)^{-1}] \times 100\%$, dalam hal ini TKi = tingkat kesesuaian responden; Xi = skor penilaian tingkat kinerja dan Yi = penilaian dari tingkat kepentingan.

Hasil dari rumus ini nantinya akan didapatkan hasil persentase kepuasan para peternak. Angka persentase kepuasan dari para peternak menempati 65,47%. Pada Tabel 2 ditampilkan hasil yang lebih lengkap dari perhitungan tingkat kesesuaian pada masing-masing atribut. Hasil dari masing-masing atribut diperoleh dengan menggunakan perbandingan antara *performance* dengan *importance* dari 19 atribut pertanyaan yang menjadi representasi dari penerapan kebijakan penanganan kasus PMK oleh otovet sudah cukup baik karena terdapat variabel yang besarnya mencapai di atas 75%.

Menurut hasil dari penelitian ini yang disajikan pada Tabel 2, peringkat tertinggi mencapai 75% yang menunjukkan variabel tentang pelayanan dari otovet diberikan dengan penuh perhatian dan otovet memberikan rasa aman dan nyaman dalam menerima aduan, sedangkan peringkat terendah yaitu 1,07% dengan variabel penampilan pejabat otovet yang rapi dan menarik setelah mendapatkan prioritas dari keputusan maka dibuat kuadran guna mengelompokkan atribut.

SIMPULAN

Tingkat kepuasan peternak dan dokter hewan terhadap kinerja Otoritas Veteriner (otovet) Kabupaten Bandung berada pada kategori sedang, dengan persentase 65,47%. Hasil Gap analysis juga menunjukkan kepuasan sedang (64,57%) dengan nilai kesenjangan/gap keseluruhan sebesar -25,4, menandakan bahwa pelayanan belum sepenuhnya memenuhi harapan. Terdapat lima atribut di kuadran A yang perlu menjadi prioritas peningkatan kinerja.

SARAN

Perlunya Otoritas Veteriner Pusat memastikan implementasi kebijakan nasional oleh Otovet daerah, perlu penggunaan hak prerogatif untuk pengambilan keputusan strategis, serta pendataan dan evaluasi berkala dengan melibatkan masukan dari Otoritas Veteriner daerah, demi meningkatkan efektivitas dan kinerja layanan veteriner.

Peneliti menyarankan agar Kementerian Pertanian melakukan kajian ulang terhadap kebijakan dan sanksi yang berkaitan dengan lalu lintas hewan, mengingat pengendalian penyakit hewan menular sangat bergantung pada regulasi yang kuat di bidang tersebut. Selain itu, kinerja Otoritas Veteriner akan lebih optimal apabila didukung oleh kolaborasi lintas sektor (pendekatan pentahelix) yang saling bersinergi untuk memper-

kuat pelaksanaan tugas di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pejabat Otoritas Veteriner Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung yang telah bersedia melakukan sesi wawancara untuk melihat sudut pandang pejabat dalam membentuk kebijakan. Kemudian penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah membantu memberikan masukan dan motivasi selama penulisan. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada para peternak Kecamatan Pangalengan dalam berkontribusi untuk mengaspirasikan kepuasan layanan pejabat Otoritas Veteriner.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Salihi KA. 2019. The epidemiology of Foot and mouth disease outbreaks and its history in Iraq. *Veterinary World* 12(5): 706–712.
- Awel SM, Dilba GM, Abraha B, Zewde D, Wakjira BS, Aliy A. 2021. Seroprevalence and Molecular Detection of Foot and Mouth Disease Virus in Dairy Cattle Around Addis Ababa, Central Ethiopia. *Veterinary Medicine (Auckland NZ)* 12: 187–197.
- Azeem A, Rashid I, Hassan MM, Asad M, Kaukab G, Tehseen A, Amir S. 2020. A review on foot and mouth disease in dairy animals, etiology, pathogenesis and clinical findings. *Pure Applied Biology* 9(1): 821–832.
- Beck AT, Steer RA. 1993. *Beck Depression Inventory Manual*. San Antonio. Psychological Corporation.
- Budiono NG, Afni NVN, Anidya DK, Najibah S, Manisyah, Sudrajat AH, Gustoma R, Akbar RIS, Mahdiansyah FL, Sarita NR, Ummah F. 2023. Education of Foot and Mouth Disease and Meat Processing in Pangkal Jaya Village Communities (Bogor District)

- to Prevent Disease Transmission in Split-toed Animals. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* 5(1): 10–21.
- Dharmawibawa ID, Imran A, Royani I, Santika S. 2022. Sosialisasi Pemberian Vaksin PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan Pemasangan Ear Tag Kolaborasi bersama UPT Peternakan dan Pertanian Praya Tengah. *Lumbung Inovasi* 7(4): 748–755.
- Firman A, Trisman I, Puradireja RH. 2022. Economic Impact of Foot and Mouth Diseases Outbreak on Cattle and Buffalo in Indonesia. *Mimbar Agribisnis* 8(2): 1123–1129.
- Hua J, Chen WY. 2019. Prioritizing urban rivers ecosystem services: An importance performance analysis. *Cities* 94: 11–23. doi: 10.1016/j.cities.2019.05.014.
- Kim S, Ji Y. 2018. Gap analysis. In: *The International Encyclopedia of Strategic Communication*. Hoboken, New Jersey. John Wiley & Sons, Inc. doi: 10.1002/9781119010722.iesc0079.
- Onodera T, Sakudo A, Sugiura K, Haritani M, Furusaki K, Kirisawa R. 2023. Antiviral agents and disinfectants for foot-and-mouth disease (Review). *Biomedical Reports* 19(57): 1–9.
- Rohma MR, Zamzami A, Putri HU, Adelia HK, Cahya DW. 2022. Foot and Mouth Disease Virus Cases in diagnosis, incidence rate, disease impact, and treatment. (*Proceeding*). The 3rd National Indonesia: Epidemiology, disease Conference of Applied Animal Science. Jember. Department of Animal Science Politeknik Negeri Jember.
- Supranto J. 2016. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Taber KS. 2018. The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education. *Research in Science Education* 48(6): 1273–1296. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>.